

## Pembentukan Kampung Keluarga Berencana di Desa Mekarwangi

Muchtar<sup>1</sup>, Nurbudiwati<sup>2</sup>, Mila Karmila<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut  
muchtar@fisip.uniga.ac.id

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut  
nur.budiwati@fisip.uniga.ac.id

<sup>3</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut  
Milakarmila14@fisip.uniga.ac.id

### Kata Kunci:

1. Kampung KB
2. Keluarga Berencana
3. Ketahanan Keluarga

### Abstrak:

Kampung KB adalah sebuah model atau bentuk miniatur pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh bidang dilingkungan BKKBN dan bersinergi dengan kementerian atau lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi Kampung KB) di seluruh Kabupaten atau Kota seperti yang dicanangkan oleh Presiden pada tanggal 14 Januari 2016 bahwa setiap Kecamatan di seluruh Indonesia harus terdapat satu Kampung KB dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui program KKBPK yang terintegrasi dengan sektor pembangunan lainnya. Pembentukan Kampung Keluarga Berencana sendiri memiliki hakikat dimana kampung tersebut menjadi ikon KB sebagai media kampanye penyebaran program KB, pembinaan keberlangsungan ber KB yang sangat membantu terhadap penurunan angka kelahiran, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan pelayanan.

## Pendahuluan

Kampung KB adalah satuan yang melibatkan wilayah setingkat RW, dusun, atau setingkat lainnya yang memiliki kriteria tertentu, di mana didalamnya terdapat keterpaduan Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) serta memiliki pembangunan dilaksanakan secara sistemik dan sistematis sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. (Afidah, 2019)

Amanat Presiden Republik Indonesia, kepada BKKBN agar dapat menyusun suatu kegiatan atau program yang dapat memperkuat upaya pencapaian target atau sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2015-2019, kegiatan tersebut dapat menjadi ikon BKKBN serta dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia diseluruh tingkatan wilayah. Dalam hal ini kemudian disepakati agar BKKBN segera dapat membentuk Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) .

Kampung KB sendiri merupakan salah satu kegiatan prioritas yang sesuai dengan Intruksi Presiden RI, terutama sebagai bentuk investasi Program KB yang manfaatnya dapat secara langsung diterima oleh masyarakat. Kampung KB adalah sebuah model atau bentuk miniatur pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh bidang dilingkungan BKKBN dan bersinergi dengan kementerian atau lembaga, mitra kerja, stakeholders serta instansi yang terkait, yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah tersebut, dan dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi Kampung KB) diseluruh Kabupaten atau Kota (Iriany et al, 2019).

Pada tanggal 14 Januari 2016 Presiden RI telah mencanangkan Kampung KB di Dusun Jenawi Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cierbon, untuk kelanjutannya BKKBN bekerjasama dengan Kementrian dan Lembaga terkait untuk menindaklanjuti pengembangan Kampung KB, dengan adanya lanjutan kerjasama mengenai Pengembangan Kampung KB, diharapkan pada tahun 2017 mampu mengembangkan Kampung KB. minimal (satu) di setiap Kecamatan.

Di Kabupaten Garut Kecamatan Talegong Terdapat tujuh desa, dimana dari tujuh desa tersebut ada dua desa yang belum membentuk Kampung KB yaitu Desa Mekarwangi dan Desa Sukamaju. Pengabdian Universitas Garut diadakan di Desa Mekarwangi yang merupakan salah satu dari tujuh desa yang belum membentuk Kampung KB, Mekarwangi sendiri adalah sebuah desa pemekaran dari Desa Selaawi dimana pada Tahun 2004 Desa Mekarwangi resmi berpisah dari Desa Selaawi. Desa Mekarwangi terletak antara 6044' - 70083' Lintang Selatan dan 107,021' - 108,021' Bujur Timur, dengan luas wilayah 360,6018 Ha, yang terdiri dari 3 Dusun, dengan 6 Rukun Warga (RW), dan 19 Rukun Tetangga (RT).

Di Desa Mekarwangi pembentukan Kampung KB sendiri sudah direncanakan dari awal tahun 2017 lalu mengingat instruksi dari Kepala Kecamatan Talegong bahwa semua desa di Kecamatan Talegong harus segera membentuk Kampung KB, tetapi sampai awal tahun 2019 Kmpung KB di Desa Mekarwangi belum terlaksana. Dengan demikian tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Garut membantu semua proses pembentukan Kampung KB di Desa Mekarwangi Kecamatan Talegong Kabupaten Garut.

Pembentukan Kampung Keluarga Berencana sendiri memiliki hakikat dimana kampung tersebut menjadi ikon KB sebagai media kampanye penyebaran program KB, pembinaan keberlangsungan ber KB yang sangat membantu terhadap penurunan angka kelahiran, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan pelayanan. (Nuraeni & KOMUNITAS, 2011)

## Metode

Pada kegiatan pengabdian ini, pelaksanaan pembentukan Kampung Keluarga Berencana di Desa Mekarwangi Kecamatan Talegong Kabupaten Garut mengikuti metode yang ada di buku pedoman pengelolaan Kampung KB, antara lain:

1. Prinsip-Prinsip Pembentukan Kampung KB
  - a. Kampung KB merupakan istilah yang baku (tidak diganti dengan istilah yang lain).
  - b. Membina dan meningkatkan kesetaraan ber-KB.
  - c. Dibentuk untuk memantapkan delapan fungsi keluarga.
  - d. Pelayanan yang diberikan terintegrasi anara program KKBPK dengan lintas sektor terkait.
  - e. Merupakan gerakan yang diprakarsai masyarakat.
  - f. Tidak bermuatan politis didalamnya.
2. Prasyarat dan Kriteria Pembentukan Kampung KB
  - A. Prasyarat:
    - a. Tersedia data dan informasi keluarga
    - b. Adanya dukungan dan komitmen Pemda
    - c. Partisipasi aktif masyarakat, tokoh masyarakat dan PPKBD, Sub-PPKBD serta para Kader
  - B. Kriteria:
    - a. Kriteria sasaran utama:
      1. Jumlah keluarga miskin diatas rata-rata tingkat desa dimana kampung tersebut berada.
      2. Jumlah peserta KB tingkat desa dimana kampung tersebut berlokasi.
    - b. Kriteria Wilayah (Pilihan sesuai kondisi):
      1. Kumuh
      2. Pesisir atau Nelayan
      3. Daerah Aliran Sungai (DAS)
      4. Bantaran Kereta Api
      5. Kawasan miskin (Termasuk miskin perkotaan)
      6. Terpencil
      7. Wilayah perbatasan
      8. Kawasan industri

9. Kawasan wisata
10. Tingkat kepadatan penduduk tinggi
3. Pendataan Potensi Wilayah  
Sebelum pembentukan, harus dilakukan pendataan dan pemetaan potensi wilayah, yang mencakup:
  - a. Potensi sebagai pengelola (PPKBD, Sub-PPKBD, Paguyuban dan tokoh-tokoh masyarakat).
  - b. Potensi kegiatan (Poktan Tribina, Poktan kegiatan sektor lainya yang harus ada di kampung).
  - c. Potensi pelayanan ( Posyandu, Polindes, Bidan Praktek).
4. Pembentukan Pokja Kampung KB
  - a. Untuk mengelola Kampung KB perlu dibentuk kelompok kerja (Pokja) atau pengurus Kampung KB yang disepakati bersama. Pembentukan pokja atau pengurus Kampung KB bisa dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan, dan muatan lain yang diinginkan di wilayah masing-masing, namun tujuannya tetap mengacu pada pelaksanaan delapan fungsi keluarga .
  - b. Susunan pegurus Kampung KB adalah sebagai berikut:
    1. Pelindung atau penanggung jawab : Kepala Desa atau Lurah
    2. Penasehat : BPD, Ketua TP-PKK Desa, PB, PPKBD/Pos KB
    3. Ketua : Kepala dusun/ Ketua RW/ Tokoh Masyarakat
    4. Sekretaris : Sub-PPKBS/ Sub-Pos KB
    5. Bendahara : Pengurus PKK RW
    6. Seksi-seksi :
      - a. Keagamaan : (Dipilih)
      - b. Sosialisasi/ Pendidikan : (Dipilih)
      - c. Reproduksi : (Dipilih)
      - d. Ekonomi : (Dipilih)
      - e. Perlindungan : (Dipilih)
      - f. Kasih Sayang : (Dipilih)
      - g. Sosial Budaya : (Dipilih)
      - h. Pembinaan lingkungan : (Dipilih)
5. Membangun Kesepakatan Bersama  
Setelah dibentuk pokja Kampung KB, maka dilakukan musyawarah warga kampung untuk menyepakati pembentukan Kampung KB.
6. Pembentukan atau pencanangan Kampung KB  
Setelah warga RW/Dusun menyepakati pembentukan Kampung KB, maka ketua atau pengurus Pokja Kampung KB mengusulkan kepada kepala desa/lurah/camat untuk mencanangkan dan mengukuhkan terbentuknya Kampung KB.

## Hasil dan Pembahasan

Kampung KB merupakan suatu wilayah yang didalamnya mengandung unsur pembangunan keluarga serta untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, yang dimulai dari pemerintahan terendah seperti tingkat RW, Dusun atau yang setara dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program pembangunan antara program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan pembangunan Keluarga (Astuti et al, 2019).

Ketahanan keluarga harus diawali dengan kualitas masing-masing anggota keluarga terdiri dari bapak, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya yang mempunyai akhlak, nilai-nilai moral yang baik dan tentunya harus dilandasi dengan pendidikan dan pemahaman agama yang kuat untuk diimplementasikan dalam keluarga dan masyarakat, hal tersebut sebagai landasan keluarga menjadi keluarga yang baik, harmonis, tidak mudah tercerai-berai sehingga terwujudnya ketahanan keluarga yang tangguh (Iriany, 2014). Unsur pekawinan dan pengaturan kelahiran, ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga bisa tercapai apabila keluarga melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik. Paling sedikit ada delapan fungsi keluarga yaitu :fungsi agama, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan, fungsi sosialisasi/pendidikan, fungsi reproduksi, fungsi kasih sayang, fungsi sosial budaya maupun fungsi pembinaan lingkungan .

Pelaksanaan delapan fungsi keluarga tidak bisa hanya dilaksanakan masing-masing keluarga, akan tetapi ada keterkaitan dengan keluarga lain yang terhimpun dalam kesatuan di lingkungan terdekat, dan itulah makna pembentukan Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB).

Yang menjadi tujuan pengabdian Universitas Garut adalah untuk membentuk Kampung KB di Desa Mekarwangi Kecamatan Talegong Kabupaten Garut terlaksana pada tanggal 6 Februari 2019 dengan turunya Surak Keputusan Kepala Desa Mekarwangi Nomor: 14/3-Kep/2019 tentang Pembentukan Pengurus/Pokja Kampung KB Kaduwangi yang bertempat di Dusun 03 RW 06 Kampung Kadunenggang Desa Mekarwangi.

Dengan pengurus/Pokja Kampung KB sebagai berikut:

1. Pelindung atau Penasehat : ADIN (Kepala Desa Mekarwangi)
2. penanggung jawab : ELI SURYANA (Pos KB Desa Mekarwangi)
3. Ketua : USMAN (Kepala Dusun 03)
4. Sekretaris : CAHYANA
5. Bendahara : AEP
6. Seksi-seksi :
  - a. Keagamaan : DASEP ANWAR
  - b. Sosialisasi/ Pendidikan : SUSILAWATI
  - c. Reproduksi : DEDEH SETIAWATI
  - d. Ekonomi : SURYATI
  - e. Perlindungan : CICA PUSPITA
  - f. Kasih Sayang : NENG DARTINI
  - g. Sosial Budaya : LINA
  - h. Pembinaan lingkungan : JAJANG RAMDAN

## Simpulan

Pembangunan keluarga sejahtera maknanya identik dengan pengetasan kemiskinan, karena tujuannya sama meningkatkan derajat kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat. Secara sederhana keluarga itu akan sejahtera, apabila beban yang ditanggung keluarga tidak berat, ekonominya kuat, dan ketahanannya mantap. Program pembangunan keluarga yang terakumulasi dalam KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) dengan empat garapan yaitu pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pemantapan ketahanan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Sebagai wadah untuk melaksanakan KKBPK dan delapan fungsi keluarga maka perlu di bentuknya Kampung KB, dimana Kampung KB sendiri sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui program KKBPK yang terintegrasi dengan sektor pembangunan lainnya, memantapkan delapan fungsi keluarga dalam aplikasi kehidupan, mengintegrasikan program pembangunan lintas sector dalam memberikan pelayanan kepada keluarga, dan menumbuhkan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.

## Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas dari pembentukan Kampung KB yang bertempat di Dusun 03 RW 06 Kampung Kadunenggang Desa Mekarwangi kami dari tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Garut menyarankan untuk:

1. Kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut (DPPKBPPA) meningkatkan pengawasan dan evaluasi berkala sehingga mengetahui perkembangan Kampung KB guna mengetahui kelemahan program-program yang berjalan sehingga pemerintah dapat memberikan solusi yang tepat.
2. Pemerintah lebih memperhatikan secara khusus wilayah Kampung KB terutama dalam bidang pendidikan agar masyarakat memiliki pengetahuan dan keahlian yang diharapkan dapat membangun kualitas SDM masyarakat yang mempunyai daya saing mempunyai sehingga dapat meningkatkan ekonomi dan memperbaiki taraf hidup masyarakat itu sendiri.
3. Petugas PLKB dan Kader harus lebih aktif dalam memberikan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat, responsif dalam menanggapi aspirasi-aspirasi dari masyarakat sekitar Kampung KB, dan memberi solusi dengan cara pengimplementasian terhadap aspirasi-aspirasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut.

## Daftar Pustaka

- Afidah, N. N. (2019). Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia Sasindo Unpam. In *Proceedings* (Vol. 1).
- Akbar, G. G., Hermawan, Y., & Karlina, A. L. (2019). Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 1-8.
- Astuti, S., Ismail, A., & Mustadjar, M. (2019). *Program Kampung Keluarga Berencana (KB) dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera di Dusun Balabatu Desa Buntu Barana Kabupaten Enrekang*. Universitas Negeri Makassar.
- Hamdani, N. A., & Ramdhani, A. (2019). *Teori Organisasi*. Bandung: Karima.
- Iriany, I. S. (2014). Pendidikan karakter sebagai upaya revitalisasi jati diri bangsa. *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, 8(1), 54–85.
- Iriany, I. S., Purnawan, A., & Nugraha, A. Y. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana (KB) Di Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 10(2), 9–16. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v10i2.36>
- Nuraeni, A., & Komunitas, K. K. (2011). Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di PUSKESMAS. *Progr. Pascasarjana-Fak. Ilmu Keperawatan, UI*.
- Pedoman Pengelolaan Kampung Keluarga Berencana oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2017.
- Pundenswari, P. (2017). Analisa Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik bidang Kesehatan terhadap Kepuasan Masyarakat. *Jurnal Publi*, 11 (1), 13-21.

